

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Membangun Indonesia diperlukan upaya perencanaan besar dan terencana dalam rangka mewujudkan tujuan Indonesia dalam mencapai pembangunan yang merata di seluruh Indonesia termasuk desa. Hasil dari perencanaan dapat berupa program yang bisa diimplementasikan dengan menggunakan berbagai strategi yang dianggap unggul dan bisa mencapai tujuan dari program tersebut. Pembangunan ialah cara berproses dimana keterlibatan berbagai perubahan yang mendasar pada sikap masyarakat, struktur sosial hingga lembaga nasional beserta penurunan ketimpangan, kecepatan kemajuan serta pengentasan kemiskinan (Todaro & Smith, 2011).

Pemerintah Indonesia menjadikan desa sebagai titik fokus dalam melaksanakan pembangunan nasional. Dengan salah satu cita-cita pemerintahan Indonesia di bawah pimpinan presiden Joko Widodo yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah kecil dan desa dengan mengimplementasikan Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi dasar dan rujukan pembangunan desa, tata kelola desa, pembinaan desa yang terintegrasi dan berkelanjutan guna mewujudkan desa yang mandiri, kuat dan sejahtera. Karena membangun desa berarti membangun Indonesia.

Sultan Sjahir yang memiliki peran penting dalam mendirikan bangsa ini mengatakan bahwa sebagai entitas sosial, desa ialah variabel yang sangat dibutuhkan bagi majunya negara Indonesia. Sebab, desa ialah Indonesia serta Indonesia ialah terdiri dari desa-desa itu sendiri (Iskandar, 2020). Desa adalah ruang teritorial terkecil dari Indonesia dan mempunyai kompleksitas permasalahan sosial-ekonomi. maka, permasalahan sosial dan ekonomi diperdesaan bisa teratasi dan diwujudkan (Iskandar, 2020). Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa akar permasalahan pembangunan di negara Indonesia berada di Desa.

Desa ialah sumber identifikasi masalah, desa mempunyai presentase angka kemiskinan tertinggi, presentase yang paling besar penduduk dengan tingkat angka kesehatan yang rendah jika dibandingkan dengan kota. Oleh sebab itu bahwa menata kembali pembangunan manusia, peningkatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat, serta agar terwujudnya Indonesia maju, mulailah dari desa (Iskandar, 2020).

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang mempunyai populasi yang sangat besar dengan beragam tantangan dalam pembangunan desa. Pembangunan daerah-daerah Indonesia memiliki potensi sumber daya alam, budaya dan manusia yang beragam. Namun tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas hidup serta pelayanan kepada masyarakat sebagai warga negara. maka dari itu pembangunan desa dijadikan sebagai salah satu prioritas dalam agenda pembangunan nasional. Dalam pembangunan desa pemerintah Indonesia sudah melaksanakan banyak upaya dengan cara mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka meningkatkan infrastruktur, kesejahteraan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan serta peningkatan ekonomi di desa.

Provinsi Jawa Barat adalah salah satu dari 38 Provinsi yang mempunyai jumlah penduduk terpadat di Indonesia yaitu pada tahun 2022 bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk di Jawa Barat adalah 49.405.810 jiwa serta memiliki 5.957 Desa dengan beragam potensi baik dari segi ekonomi, budaya serta sumber daya alam yang sangat melimpah. Namun seperti halnya di daerah lain di negara ini, bahwa provinsi Jawa Barat juga menghadapi tantangan pembangunan terutama di tingkat desa. Pembangunan desa sangatlah penting karena desa merupakan entitas paling dekat dengan masyarakat, tempat lahir dan menjalani kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Meningkatkan kualitas kehidupan di tingkat desa akan memberikan dampak yang positif pada kualitas secara keseluruhan di provinsi Jawa Barat ini.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dibawah Urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan program Gerakan Membangun Desa yang disingkat dengan Gerbang Desa sebagai upaya dalam membangun desa serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan gerakan membangun desa atau yang biasa disebut gerbang desa ialah upaya dalam mewujudkan desa yang mandiri, yang mampu membangun dan memberdayakan masyarakat desa dengan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi desa, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sarana dan prasarana desa, melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya

Memiliki kebijakan yang sama mengenai kebijakan membangun desa dengan provinsi lain di Indonesia, tetapi Gerbang desa ini merupakan program yang hanya dimiliki dan dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu langkah yang digunakan dalam rangka mengakselerasi pembangunan desa di Jawa Barat dengan 12 program yaitu Satu Desa Satu Bumdes, *One Village One Company*, CEO Bumdes, Patriot Desa, Desa Digital, kampung keluarga Juara, Desa Sejahtera Mandiri, Desa Wisata, Mobil Siaga, Penguatan Infrastruktur Pedesaan, Sapa Warga dan Jembatan Desa.

Hakikat dari tujuan adanya membangun desa adalah semata-mata untuk peningkatan kualitas hidup serta sejahteranya penduduk desa dengan adanya keterlibatan masyarakat supaya adanya pengembangan potensi masyarakat desa dan kemandirian desa. Potensi yang bisa dikembangkan masyarakat desa ialah kemampuan wawasan pengetahuan, kemampuan sikap, kreativitas, berperilaku, kesadaran dan potensi yang lainnya. (Prayitno & Subagiyo, 2018).

Pemerintah dalam menentukan lokus sasaran penanggulangan Desa tertinggal dan perkembangan strata desa lainnya mengeluarkan indeks desa membangun, kemudian dijadikan peta pengembangan pembangunan

desa (Astika & Subawa, 2021). Indeks Desa Membangun atau akronimnya IDM dibuat pemerintah agar dapat mengukur perkembangan desa dari berbagai aspek berupa indeks yang diterbitkan setiap tahun. perkembangan nilai IDM di Jawa Barat dilihat dari rata-rata indeks kompositnya, yakni dari indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), indeks Ketahanan Lingkungan (IKL), dan Indeks Ketahanan Sosial (IKS) dalam enam tahun terakhir ini (2018-2022) yang bersumber dari website open data jabar, nilai rerata IDM Jawa Barat selalu mengalami kenaikan peringkat hingga puncaknya terjadi pada tahun 2022, yaitu meningkat menjadi peringkat ketiga nasional dan peringkat kedua di pulau Jawa setelah DI Yogyakarta pada tahun 2022.



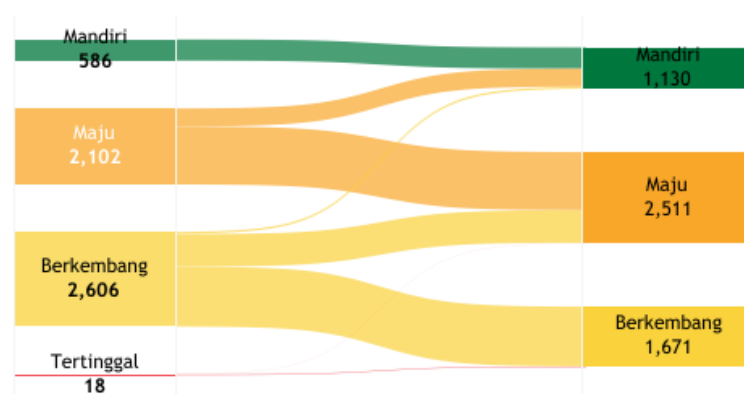
Sumber: Open Data Jabar

Pemerintah provinsi Jawa Barat menetapkan *goals* pencapaian IDM yang di rumuskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 dan kemudian ditetapkan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2019 sampai 2022 nilai rerata IDM Jawa Barat selalu melebihi target yang ditetapkan dengan selisih 3-7%. Kemudian Indeks Komposit (IKS, KE, IKL) Nilai IDM Jawa Barat tahun 2023 ialah 0,7798 yang semula pada tahun 2022 IDM Jawa Barat adalah 0,75.

Melihat perkembangan status desa di Jawa Barat yang bersumber dari website open data jabar bahwa pada tahun 2021 sampai 2022, mayoritas desa di Jawa Barat mengalami peningkatan status sebanyak satu tahap, yakni dari desa maju mengalami perbaikan menjadi desa mandiri sebanyak 495 desa, desa berkembang menjadi desa maju sebanyak 902 desa, serta desa tertinggal menjadi desa berkembang sebanyak 16 desa. Disamping itu desa yang mengalami perbaikan status dua tahap sebanyak 51 desa, yaitu Desa Berkembang menjadi desa mandiri sebanyak 49 desa, kemudian desa tertinggal menjadi desa maju sebanyak 2 desa.

Grafik 1.2

Perkembangan Status IDM Jawa Barat Tahun 2021-2022



Sumber: Website Open data Jabar

Bersumber dari rilis Humas Pemprov Jabar, tahun 2023 Jawa Barat memiliki 5.312 Desa yang membutuhkan pengembangan serta pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian desa. Namun sampai 2023 ini provinsi Jawa Barat mampu mengentaskan desa berstrata tertinggal dan desa sangat tertinggal dan juga meningkatkan jumlah desa mandiri yang ada di provinsi Jawa Barat yang sebelumnya pada tahun 2022 berjumlah 1.130 desa menjadi 1.828 desa.

Semua pencapaian nilai rerata IDM Jawa Barat selalu melebihi target yang ditetapkan dengan selisih 3-7% serta perkembangan status desa di Provinsi Jawa Barat yang naik secara signifikan merupakan salah satu dampak dari diselenggarakannya program gerbang desa. Dari

fenomena tersebut diatas mengenai keberhasilan provinsi Jawa Barat dalam membangun desa menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian terkait bagaimana strategi pemerintah provinsi Jawa Barat dalam membangun desa melalui program Gerbang Desa? Dengan begitu penelitian ini akan di fokuskan pada bagaimana strategi pemerintah provinsi Jawa Barat dalam membangun desa melalui program Gerbang Desa (Gerakan Membangun Desa) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasar dari latar belakang tersebut diatas, maka penulis telah mengidentifikasi masalah yang kemudian akan dipakai sebagai bahan dari adanya penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Nilai rerata IDM Provinsi Jawa Barat selalu mengalami kenaikan peringkat hingga puncaknya terjadi pada tahun 2022, yakni meningkat menjadi peringkat ketiga nasional dan peringkat kedua dipulau Jawa setelah DI Yogyakarta pada tahun 2022.
2. Dari tahun 2019 sampai 2022 nilai rerata IDM Jawa Barat selalu melebihi target yang ditetapkan dengan selisih 3-7%. Indeks Komposit (IKS,IKE,IKL) Nilai IDM Jawa Barat tahun 2023 ialah 0,7798 yang semula pada tahun 2022 IDM Jawa Barat adalah 0,75.
3. Pembangunan desa tertinggal serta desa sangat tertinggal di provinsi Jawa Barat telah dituntaskan seluruhnya. Maka dari itu Jawa Barat telah berhasil mengimplementasikan program gerbang desa dengan zero Desa tertinggal sejak tahun 2022. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berhasil meningkatkan jumlah desa mandiri yang sebelumnya pada tahun 2022 berjumlah 1.130 desa menjadi 1.828 desa. Jumlah strata desa maju mengalami perbaikan dan meningkat lebih banyak ketimbang strata Desa berkembang yakni desa maju berjumlah 2.553 desa dan desa berkembang berjumlah 930.

Dari permasalahan tersebut, keberhasilan provinsi Jawa Barat dalam membangun desa menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian terkait strategi pemerintah provinsi Jawa Barat dalam membangun desa melalui program Gerbang Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat.

1.3. Rumusan Masalah

Bersumber dari latar belakang yang telah dijelaskan tadi, maka dari itu penulis merumuskan masalah untuk penelitian adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah strategi pemerintah provinsi Jawa Barat dalam membangun desa melalui program Gerbang Desa ditinjau dari dimensi perumusan strategi?
2. Bagaimanakah strategi pemerintah provinsi Jawa Barat dalam membangun desa melalui program Gerbang Desa ditinjau dari dimensi implementasi strategi?
3. Bagaimanakah strategi pemerintah provinsi Jawa Barat dalam membangun desa melalui program gerbang desa ditinjau dari dimensi evaluasi strategi?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan adanya penelitian ini ialah untuk memperoleh data serta informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi pemerintah provinsi Jawa Barat dalam membangun desa melalui program gerbang desa ditinjau dari dimensi perumusan strategi.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi pemerintah provinsi Jawa Barat dalam membangun desa melalui program Gerbang Desa ditinjau dari dimensi implementasi strategi.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi pemerintah provinsi Jawa Barat dalam membangun desa melalui program gerbang desa ditinjau dari dimensi evaluasi strategi.

1.5. Manfaat

1. Secara Teoretis
 - a. Memperkaya wawasan dan ilmu pengetahuan dengan adanya penelitian yang dilakukan.
 - b. Menambah pemahaman serta pembelajaran untuk peneliti ataupun mahasiswa lain dalam melakukan penelitian khususnya tentang Strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dalam Membangun Desa Melalui Program Gerbang Desa.
2. Secara Praktis
 - a. Untuk Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan harapan bisa dijadikan evaluasi dan dijadikan bahan pertimbangan untuk terus meningkatkan pemerintahan yang baik terutama dalam memberdayakan masyarakat khususnya mengenai Strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Membangun Desa melalui Program Gerbang Desa.
 - b. Bagi pemerintahan daerah lain, diharapkan dapat dijadikan contoh dalam hal pencapaian provinsi Jawa Barat dalam membangun desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
 - c. Untuk peneliti, memperkaya ilmu pengetahuan serta wawasan terutama dalam hal cara membangun desa yang juara di provinsi Jawa Barat dan umumnya di Indonesia.

1.6. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini mengenai strategi pemerintah provinsi Jawa Barat dalam membangun desa melalui program Gerbang Desa (Gerakan Membangun Desa) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat ini di fokuskan pada variabel yang dipakai peneliti yaitu manajemen strategi yang diungkapkan oleh David (2011) yang memiliki 3 aktivitas strategi yaitu sebagai berikut.

1. Perumusan strategi program Gerbang Desa
2. Implementasi strategi program Gerbang Desa
3. Evaluasi strategi program Gerbang Desa

1.7. Kerangka Berpikir

Pemerintah Indonesia menjadikan desa sebagai titik fokus dalam melaksanakan pembangunan nasional. Maka dari itu pemerintah provinsi Jawa Barat melaksanakan kewajiban tersebut yang kemudian melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan gerakan membangun desa atau yang biasa disebut Gerbang Desa. Dengan permasalahan serta pencapaian provinsi Jawa Barat dalam membangun desa membuat peneliti tertarik mengenai strategi yang dilakukan pemerintah provinsi Jawa Barat dalam menjalankan program membangun desa. Penelitian tentang Strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dalam Membangun Desa Melalui Program Gerbang Desa Studi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat menggunakan model strategi yang diungkapkan oleh David (2011). Adapun pada saat melakukan penelitiannya dengan mengacu pada tiga aktivitas strategi yang menjadi acuan pada penelitian ini mengenai strategi yang digunakan oleh pemerintah provinsi Jawa Barat dalam membangun desa yang ada di provinsi Jawa Barat ini.

1. Perumusan Strategi

Dalam aktivitas Perumusan strategi yakni proses penyusunan langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan dengan melihat kesempatan serta ancaman dari luar, menyepakati kemampuan serta kelemahan yakni penilaian dari dalam, merumuskan dan strategi inisiatif serta mengambil strategi supaya dilaksanakan. Adapun yang menjadi kegiatan dalam perumusan strategi adalah sebagai berikut.

- 1) Mengembangkan visi dan misi
- 2) Mengidentifikasi kesempatan dan hambatan eksternal
- 3) Menentukan kekuatan dan kelemahan internal
- 4) Menetapkan tujuan jangka panjang
- 5) Menghasilkan alternatif strategi dan menentukan strategi khusus.

2. Implementasi Strategi

Aktivitas kedua yaitu melakukan strategi yang sudah ditetapkan, kemudian diperlukan kesepakatan serta gotong-oyong dari seluruh bidang, para pemimpin juga anggota organisasi. Adapun yang menjadi kegiatan dalam implementasi strategi sebagai berikut.

- 1) Keputusan untuk melaksanakan program baru yang sudah di rumuskan.
- 2) Pengalokasian sumber daya
- 3) Cara menghindari dan mengurangi kendala implementasi strategi.

3. Evaluasi Strategi

Dalam tahap ini, evaluasi strategi dijadikan sebagai parameter dalam melihat strategi yang telah dilakukan dapat dipakai lagi oleh sebuah organisasi serta evaluasi perlu sekali dilakukan dalam rangka kepastian sasaran yang dinyatakan sudah diwujudkan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan. Adapun kegiatan evaluasi strategi adalah sebagai berikut.

- 1) *Review* faktor eksternal dan internal dari strategi yang diimplementasikan
- 2) Mengukur kinerja
- 3) Mengambil Tindakan korektif

Model teori dari David (2011) dipilih karena memiliki keunggulan dibandingkan dengan teori lain seperti teori strategi dari Kotler (1997) dengan tipe strategi yakni strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya dan strategi kelembagaan. Serta teori strategi dari Ranguti (2005) dengan 3 tipe strategi yaitu strategi manajemen, strategi investasi dan strategi bisnis yang cakupannya terlalu luas. Keunggulan yang dimaksud dari teori yang dipilih adalah indikator-indikator dalam teori strategi dari David (2011) lebih jelas dan terperinci serta tidak terlalu

luas sehingga lebih spesifik dan mendetail. Oleh karena itu, teori dari David dengan dimensi perumusan strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi lebih tepat untuk dijadikan acuan dalam penelitian ini karena indikator dari ketiga dimensi tersebut memiliki kesesuaian dengan apa yang menjadi fokus penelitian. Disamping itu, model strategi ini memberikan perhatian terhadap implikasi strategi dari suatu program tertentu serta dengan strategi ini bisa menghasilkan penilaian yang bisa memusatkan perhatian terhadap memaksimalkan sumberdaya esensial yang tersedia atau tidak (Salusu, 2015).

Supaya lebih jelas, penulis membuat kerangka berpikir konseptual dalam penelitian ini sehingga bisa menggambarkan lebih jelas sebagai berikut.

